

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi kawasan adalah sebuah perkumpulan entitas manusia dengan yang berbeda batas untuk setiap bentuk dan memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai atau beberapa perbedaan yang ingin dicapai dalam perbedaan pada setiap tujuan. Suatu organisasi memiliki tujuan masing-masing yang mengarah dalam sebuah kesepakatan bersama demi tercapainya kepentingan tertentu (Sobirin, n.d.). Dalam suatu negara, tidak ada negara satu pun yang bisa berdiri kokoh tanpa adanya sebuah bantuan dari negara lain. Setiap negara pasti sangat membutuhkan bantuan dari negara lain. Bantuan dari negara lain dapat membantu organisasi suatu kawasan untuk memperkuat kapasitasnya dan meningkatkan efektivitas kerja sama antar negara organisasi kawasan demi terciptanya ke stabilan dalam suatu negara. Namun, harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh negara lain tidak mengganggu independensi dan kedaulatan negara (Dian Judita, 2022).

ASEAN adalah salah satu organisasi perangkat yang terdiri dari 10 negara anggota negara di Asia Tenggara. Salah satu penyebab terbentuknya organisasi ini dikarenakan perang dingin. Keadaan yang tidak menentu antar kelompok sangat sering terjadi dengan merugikan ke beberapa negara. Pada awalnya dimulai dari dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang membawa pengaruh stabilitas keamanan pada banyak negara di Asia Tenggara. Dikarenakan pengaruh stabilitas keamanan yang signifikan kepada banyak negara di Asia Tenggara, dibutuhkan sebuah organisasi atau wadah yang dapat terkait negara di Asia

Tenggara. Amerika Serikat dan Uni Soviet, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan negara-negara berkembang. Pada masa ini, beberapa negara di seluruh dunia masih mengalami transisi. Perang dunia II telah menimbulkan berbagai kerusakan dan tentu membutuhkan waktu untuk membangun transisinya di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. Dengan keberadaan yang tidak pasti dalam kondisi krisis, itu bisa berdampak signifikan di negara kawasan. Karena itu, Asia Tenggara membentuk organisasi untuk menjaga stabilitas regional dan negara. Menjaga stabilitas akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi (Amora, 2010).

ASEAN yaitu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau sering dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* in Indonesia. Organisasi internasional regional ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan “Deklarasi Bangkok” Atau biasa disebut dengan “Deklarasi ASEAN”, yang ditandatangani oleh perwakilan lima negara Asia Tenggara kala itu, yakni Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki sepuluh anggota dan didirikan berdasarkan atas dasar kepentingan bersama berdasarkan faktor politik dan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya dan kemajuan sosial banyak negara anggotanya (Zakiyy et al, 2020).

Virus Corona (*COVID-19*) yang terjadi pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, China mengejutkan dan meresahkan seluruh dunia. *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2)* adalah virus yang menyebabkan penyakit coronavirus 2019 (*COVID-19*). Virus ini merupakan salah satu virus yang belum pernah ditemukan pada manusia. Pandemi *COVID-19* tentu tak pernah diduga eksistensinya di tengah-tengah hiruk pikuk dunia. Dampak penularannya yang terjadi secara cepat kemudian

menyebabkan kemiskinan virus ini melanda secara global. Kejadian ini secara jelas menyebabkan kelumpuhan yang fatal dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Angka terinfeksi hingga kematian meningkat setiap harinya dan peningkatan tersebut juga bisa dikatakan bukan angka yang kecil (Syauqi, 2020).

Ribuan masyarakat tumbang setiap harinya yang kemudian penanganan yang harus dilakukan adalah melakukan isolasi yang ketat. Berdasarkan data terbaru terkonfirmasi tanggal 15 April 2020 sudah sebanyak 22.174 kasus positif, Filipina menjadi kasus terbanyak dengan 5.453, Indonesia 5.136 kasus, Singapura 3.252 kasus, Malaysia 5.945, Thailand 2.643 kasus, Vietnam 267 kasus, Brunei 136 kasus, Kamboja 122 kasus, Myanmar 74 kasus, dan Laos sebanyak 19 kasus (Shafiah F. Muhibat, 2022). Pencegahan terus dihimbau dan yang seperti kita semua ketahui pencegahan yang tepat dilakukan pada permasalahan virus ini adalah mengurangi resiko penyebaran dengan merumahkan masyarakat atau isolasi mandiri untuk mengurangi kontak fisik dengan individu lainnya. Hal ini tentu berdampak besar pada aktivitas masyarakat yang terutama adalah dalam hal ekonomi.

Perkembangan perekonomian di setiap negara mulai melambat. Pengalihan aktivitas pekerjaan terjadi dari kerja di kantor atau di lapangan menjadi daring. Namun siapa sangka bahwa pandemi ini akan berlangsung lebih lama yang diperkirakan. Pandemi ini kemudian menjadi sebuah musibah jangka panjang yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dalam suatu negara. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang baik untuk dapat melakukan pekerjaan dari rumah ataupun bahkan pekerjaan tersebut tidak bisa sama sekali dilakukan secara jarak jauh hingga akhirnya masyarakat merelakan diri untuk tetap keluar rumah dan melakukan pekerjaannya demi menyambung hidup. Hal ini kemudian

menjadi masalah global yang krusial karena dampaknya sangat besar dan signifikan (Nasution et al., 2020).

Ketika pemerintah memberlakukan langkah-langkah kebijakan untuk menekan penurunan angka positif karena pandemi, masyarakat yang paling terkena dampak dari sebuah “*lockdown*” atau bentuk pembatasan pergerakan mobilitas lainnya, pekerja informal atau berupah harian, pekerja di industri, orang miskin di perkotaan, dan lansia. Masyarakat yang tidak dapat bekerja dari rumah secara digital atau tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup juga perlu adanya perhatian dari pemerintah. Usaha mikro kecil hingga menengah (UMKM) berisiko paling terkena dampak karena sumber daya yang terbatas. Selain memastikan efektivitas dari sebuah kebijakan pandemi, pemerintah memiliki tanggung jawab publik untuk membantu mereka yang paling terkena dampak, terutama jika tidak ada cakupan perlindungan sosial yang tersedia (Yunus et al., 2020).

Komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk menyebarkan informasi dan menanamkan kepercayaan, terutama di antara mereka yang paling terdampak oleh krisis Covid-19. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban sosial, stabilitas, dan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani epidemi. (Syarifuddin Akbar, 2021).

Selain menjaga kepercayaan publik, komunikasi ke masyarakat juga membantu mengendalikan dari adanya *panic buying* dan perilaku lain yang dapat meningkatkan inflasi dan mengancam ketahanan pangan. Sementara di sektor kesehatan menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tetapi dampak yang lebih luas terjadi pada kepala rumah tangga karena hilangnya pekerjaan secara massal. Hal ini terjadi terutama di usaha kecil yang tidak mampu mempertahankan karyawan, pekerja informal dalam pekerjaan sementara, pekerja gig

ekonomi, dan sektor jasa seperti perjalanan, pariwisata, ritel dan jasa lainnya (ASEAN Policy, 2020).

Salah satu bidang yang menjadi perhatian utama dalam suatu bangsa adalah masalah kesehatan. Hal ini benar karena tingkat kesejahteraan sosial suatu negara juga dipengaruhi oleh kesehatannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara, khususnya negara berkembang, akan mengalami permasalahan kesehatan. Permasalahan kesehatan merupakan permasalahan yang umum terjadi di hampir setiap wilayah di dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Pandemi *Covid-19* sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi secara global dengan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dan begitu signifikan pada sektor perekonomian. ASEAN menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menavigasi kerja sama mereka karena penghentian bisnis kerja sama mereka karena penghentian bisnis secara tiba-tiba (Amul et al., 2022).

Pandemi tidak hanya berdampak pada kesehatan saja tetapi mempengaruhi seluruh sektor lainnya terpuruk, salah satunya di sektor ekonomi. Kinerja ekonomi secara global berkurang karena berkurangnya aktivitas masyarakat. *Lockdown* dan karantina menjadi penyebab dari keterbatasannya aktivitas masyarakat imbas dari pandemi. Semua negara termasuk negara di ASEAN. Imbas dari beberapa negara yang melakukan *Lockdown* beberapa negara mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis.

Permasalahan kesehatan dan ekonomi ialah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangatlah penting. Keamanan kesehatan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi karena individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi merupakan perhatian utama bagi keamanan manusia dan, tentu saja, keamanan kesehatan. (Umaira, 2021).

Sejak keberadaan pandemi *Covid-19* diketahui tidak ada satupun negara ASEAN yang tidak terpapar virus ini. Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang tercatat sebagai kasus *Covid-19* yang terbanyak jika dibandingkan dengan negara lain yang juga termasuk di kawasan ASEAN (Ferdy Kusno, 2020).

Pandemi yang sedang berlangsung terus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global, khususnya terhadap negara-negara anggota ASEAN. Akibatnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi sektor ekonomi di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah menghadapi penurunan ekonomi yang signifikan sebagai konsekuensi dari epidemi ini, sehingga menghambat kemajuan ekonomi mereka dan menyebabkan krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Bukti dari hal ini dapat dilihat dari penurunan pendapatan per kapita di antara negara-negara Asia Tenggara, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN sebesar -3,4% pada tahun 2020. Tabel di bawah ini mengilustrasikan penurunan PDB negara-negara ASEAN sebagai akibat dari pandemi Covid-19:

Tabel 1.1 Data GDP Negara Anggota ASEAN Pada Tahun 2019-2020

No	Negara Anggota ASEAN	Persentase GDP pada tahun 2019	Persentase GDP pada tahun 2020
1.	Vietnam	6,0 %	-9,0%
2.	Kamboja	7,1%	-2,9%
3.	Laos	5,5%	-5,5%
4.	Brunei Darussalam	3,8%	1,8%
5	Myanmar	6,8%	1,7%
6.	Vietnam	7,0%	2,6%

7.	Thailand	2,4%	-6,4%
8.	Singapura	0,7%	-5,5 %
9.	Malaysia	4,3%	-5,2%
10.	Indonesia	5,0 %	-2,4%

Sumber : (Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2, 2021).

Tabel di atas menggambarkan dampak epidemi virus corona terhadap perekonomian negara-negara ASEAN. Pasal 1 (1,2) Piagam ASEAN menetapkan komitmen ASEAN untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan. Hal ini dicapai melalui kolaborasi di berbagai bidang seperti politik, keamanan, sosial, budaya, dan ekonomi. ASEAN menekankan peran penting negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi yang sedang berlangsung. (Piagam ASEAN, 2008). Oleh karena itu, tanggapan negara-negara ASEAN terhadap permasalahan ini sangatlah krusial sebab ASEAN berfungsi sebagai organisasi yang mendorong kolaborasi antar anggotanya, sehingga memerlukan tindakan atau solusi yang disarankan. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kerjasama ASEAN, Jose Tavares, saat ini terdapat beberapa cara untuk menyikapi *Covid-19*, antara lain pembatasan warga negara asing.penerapan status darurat *Covid-19*, larangan berkumpul massal, frekuensi penerbangan, penutupan atau pengurangan aktivitas serta penerapan persyaratan tambahan terhadap warga negara asing yang mengunjungi ke negara ASEAN (Janita Jaya et al., 2020).

ASEAN sebagai organisasi kawasan regional yang juga digunakan sebagai tempat wadah bagi negara anggotanya membentuk sebuah kerjasama di kawasan tersebut dengan berisikan anggota mereka untuk berupaya bersinergi membentuk upaya penekanan dampak paling buruk dari adanya pandemi ini. ASEAN yang menganggap hal ini menjadi hal yang

krusial pun akhirnya bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya untuk saling membahas dan mendukung sejumlah cara mitigasi dibidang kesehatan. Selain dibidang kesehatan mitigasi tersebut pun di sempurnakan dengan beberapa bidang lain seperti mitigasi dibidang ekonomi, mitigasi dibidang pariwisata dan juga perjalanan pariwisata itu sendiri. Hal ini dilakukan, karena, diketahui terdapat keterhambatan yang terjadi di bidang perdagangan antar negara. Padahal diharapkan perdagangan antar negara ini dapat mendorong perekonomian yang ada (Purwono,2021).

Organisasi regional ASEAN sering mengadakan pertemuan, khususnya Pertemuan Menteri Kesehatan negara-negara kawasan Asia Tenggara, untuk membahas dan merundingkan berbagai topik dan masalah yang berkaitan dengan sektor kesehatan. AHMM mendukung keputusan dan saran yang dibuat oleh Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD) untuk menciptakan kebijakan kesehatan di negara-negara ASEAN. Konferensi ini diadakan setiap 2 tahun sekali, dengan kemungkinan tambahan yang dijadwalkan sesuai kebutuhan untuk penanganan hal-hal yang mendesak.

Pertemuan Pimpinan Tertinggi Kesehatan ASEAN (SOMHD) diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja pada tanggal 4 April 2019. Dalam pertemuan tersebut, secara resmi Indonesia ditunjuk untuk memimpin kerja sama kesehatan ASEAN untuk periode 2020-2021, sebagaimana disepakati oleh para pejabat kesehatan. Penunjukan Indonesia sebagai ketua kerja sama ASEAN dibenarkan oleh kepercayaan dan keterlibatan aktif yang telah ditunjukkan oleh Indonesia dalam forum kerja sama kesehatan di ASEAN, seperti yang diakui oleh para pejabat tinggi kesehatan ASEAN (Rokom, 2019).

Di saat pandemi berlangsung , Indonesia terpilih sebagai Ketua Forum *ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)* pada tahun 2020. Alasan terpilih Indonesia sebagai Ketua Kerja

Sama Kesehatan ASEAN karena reputasinya yang terpercaya dan partisipasi aktifnya dalam forum sebuah kerja sama kesehatan di ASEAN. Indonesia mengimplementasikan beragam inisiatif peningkatan kerja sama. Beberapa kesepakatan telah dibuat untuk meminimalkan dampak krisis terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Pada awalnya, organisasi ini memutuskan untuk menambah anggaran untuk kolaborasi sebesar 10% untuk mengatasi situasi mendesak yang timbul akibat dari adanya penyebaran *Covid-19* di negara kawasan ASEAN. Keputusan untuk mengambil tindakan strategis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa memerangi epidemi membutuhkan biaya yang signifikan (Arta Bayu, 2021).

Indonesia, sebagai Ketua Kerja Sama Kesehatan ASEAN 2020-2021, telah menyelenggarakan tiga kali pertemuan selama pandemi Covid-19. Pertemuan tersebut adalah SOMHD ke-15 di Yogyakarta pada April 2020, SOMHD ke-16 pada April 2021, serta *ASEAN Health Minister Meeting* ke-15 (AHMM) pada Mei 2022. Indonesia sebagai tuan rumah telah memilih topik "Memajukan Pencapaian Pembangunan Kesehatan ASEAN" guna mempromosikan dan memperkuat kerja sama kesehatan di kawasan ASEAN. APHDA dilaksanakan sebagai fase transisi antara era 2016-2020 dan periode 2021-2025. Dalam rangka menjembatani pemerataan pembangunan kesehatan di antara negara-negara ASEAN serta menjamin kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, pertemuan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai hasil yang positif dalam bidang ini. *ASEAN Health Minister Meeting* diharapkan menjadi sebuah momentum yang tepat bagi negara kawasan ASEAN dalam upaya meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan akibat dari adanya pandemi *Covid-19* yang tidak tahu kapan akan berakhir (Rokom, 2019).

Pandemi Covid-19 telah berdampak secara signifikan bagi negara kawasan ASEAN khususnya pada sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Sehingga hal tersebut berpengaruh

terhadap perkembangan di tiap negara. Fenomena pandemi Covid-19 menjadi ancaman yang serius bagi negara di seluruh dunia, khususnya di kawasan ASEAN. Karena sangat mengganggu keberlangsungan hidup, maka dari itu diharapkan dengan adanya forum *ASEAN Health Minister Meeting (AHMM)* menjadi sebuah solusi dalam upaya mengatasi krisis kesehatan khususnya di negara ASEAN.

Penting bagi negara anggota ASEAN untuk merespon dan mempercepat sebuah inovasi dari kebijakan yang sudah disepakati guna memaksimalkan potensi hasil dari sebuah peran masing-masing sebagai bagian dari organisasi ASEAN. Melalui pendekatan seluruh pemerintah tiap negara saja tidak cukup untuk mengatasi krisis dalam pandemi *Covid 19* (Samuel Jose, 2021).

ASEAN sebagai organisasi Kawasan yang juga digunakan sebagai tempat wadah bagi negara anggotanya membentuk sebuah kerjasama di Kawasan tersebut dengan berisikan anggota mereka untuk berupaya bersinergi membentuk upaya penekanan dampak paling buruk dari adanya pandemi ini. ASEAN yang menganggap hal ini menjadi hal yang krusial pun akhirnya bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya untuk saling membahas dan mendukung sejumlah cara mitigasi dibidang kesehatan. Selain dibidang kesehatan mitigasi tersebut pun di sempurnakan dengan beberapa bidang lain seperti mitigasi dibidang ekonomi, mitigasi dibidang peningkatan sistem kesehatan masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan, karena, diketahui terdapat keterhambatan yang terjadi di beberapa bidang antar negara. Padahal diharapkan hubungan kerja sama antar negara ini dapat mendorong perekonomian yang ada (Dewi et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang terjadi di ASEAN ini

menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Peran Indonesia dalam sebuah forum *ASEAN HEALTH MINISTER MEETING (AHMM)* sebagai upaya mengatasi pandemi *Covid-19*”.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut “**Bagaimana upaya Indonesia sebagai Pimpinan Forum *ASEAN HEALTH MINSITER MEETING (AHMM)* sebagai upaya dalam mengatasi krisis kesehatan akibat dari adanya pandemi *Covid-19*?**”

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan penelitian, maka penulis akan membatasi masalah agar penelitian ini lebih fokus terhadap masalah penelitian.

Dalam hal ini Pandemi *Covid-19* telah berpengaruh ke seluruh dunia, khususnya negara ASEAN. Isu kesehatan dan isu ekonomi ialah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Keamanan kesehatan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena secara langsung melibatkan individu-individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mengingat pandemi *Covid-19* yang tidak tahu kapan akan selesai, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan aspek isu kesehatan dan penguatan sistem ekonomi dari dampak pandemi *Covid-19* melalui *ASEAN Health Minister Meeting (AHMM)* pada tahun 2020-2022.

Penelitian ini berfokus pada peran Indonesia sebagai Ketua Kerja Sama Kesehatan ASEAN dan partisipasinya dalam forum-forum kerja sama kesehatan ASEAN pada tahun 2020-2022. Indonesia telah menjadwalkan tiga pertemuan: ASEAN SOMHD ke-16 pada

April 2021 dan *ASEAN Health Minister Meeting* ke-15 (AHMM) pada Mei 2022. Pertemuan Pejabat Senior ASEAN untuk Pembangunan Kesehatan (SOMHD) ke-15 pada bulan April 2020 yang diadakan di Yogyakarta. Pemerintah Indonesia memilih topik "Memajukan Pencapaian Pembangunan Kesehatan ASEAN" guna meningkatkan kerja sama kesehatan di negara Asia Tenggara. Penulis memilih untuk membatasi topik tersebut dalam jangka waktu 2020 hingga 2022 karena akan diadakannya *ASEAN Health Minister Meeting* (AHMM) di Indonesia pada tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi negara-negara ASEAN akibat dari adanya pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui respon negara ASEAN dalam penanganan pandemi *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui hasil yang didapat Indonesia dari sebuah kerja sama melalui forum kesehatan negara anggota ASEAN dalam penanganan *Covid-19*.
4. Untuk menganalisa bagaimana peran Indonesia sebagai ketua badan sektoral terhadap peningkatan kerja sama dari negara ASEAN imbas dari adanya pandemi *Covid-19*.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan bahwa penyertaan perspektif dari para penulis dan pembaca akan bermanfaat dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan negara-negara ASEAN selama epidemi Covid-19.
2. Epidemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh ASEAN, terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi.
3. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.